

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

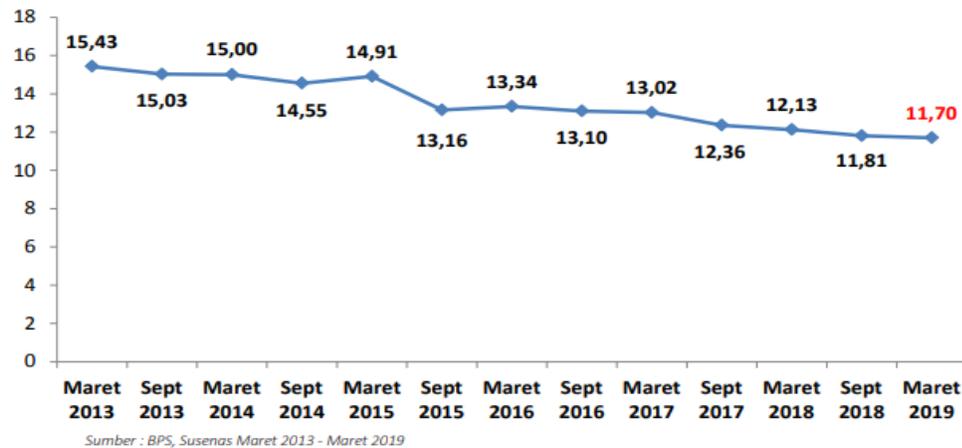
Tingkat jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 1,2% setiap tahunnya. Menurut data BPS pada tahun 2019, angka peningkatan penduduk di Indonesia mencapai 267 juta jiwa. Adapun kenaikan pada jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 3.842,9 juta jiwa pada tahun 2019 dan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk disetiap tahunnya. Jumlah penduduk yang selalu mengalami peningkatan ini membuat pemerintah wajib memperhatikan taraf kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari kesenjangan perekonomian akibat ketidak sejahteraan penduduknya.

Menurut Mosher (1987): Dian Komala dkk., 2014, hal terpenting dalam ukuran taraf kesejahteraan adalah tingkat pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Peningkatan produktivitas sama dengan meningkatkan masukan tenaga kerja dimana masukan tersebut diartikan sebagai pendapatan, maka produktivitas dikatakan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendapatan. Menurut Pratama dan Mandala (dalam Asriana, 2012) menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan tidak hanya dilihat secara materi saja. Tingkat kesejahteraan secara non materi dapat dilihat melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.

Hal ini merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tingkat kesejahteraan secara non materi dilakukan secara optimal. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi akan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, namun tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia tidak termasuk dalam tingkat yang rendah.

Hasil BPS menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin yang terdapat di Indonesia hingga bulan September 2018 yaitu mencapai 25,67 juta jiwa (9,66 persen). Hal ini diartikan bahwa angka tersebut termasuk dalam tingkat kemiskinan yang tinggi. Khususnya pada tingkat kemiskinan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilihat dari data BPS mulai bulan Maret 2013, angka presentase penduduk miskin mencapai 15,43% yang terhitung menurun pada bulan Maret 2019 dengan presentase 11,70% di Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada gambar 1.1 (BRS BPS DIY No. 21/04/34/Th.XXI, 2019). Menurut analisis makro ekonomi di kabupaten Gunung Kidul yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi D.I. Yogyakarta menempati peringkat kedua terbawah setelah kabupaten Bantul dengan rata-rata laju peningkatan garis kemiskinan selama tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 3,93% disajikan pada gambar 1.2 (BPS DIY, Feb 2019)

**Presentase Penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta
Maret 2013 – Maret 2019**



Gambar 1.1 Presentase Penduduk DIY Maret 2013- Maret2019

**Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota Yogyakarta
(Persen) 2011-2018**

Kabupaten/ Kota	Presentase Penduduk Miskin (Persen)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DIY	16.14	15.88	15.03	14.55	14.91	13.34	13.02	12.13
Kulonprogo	23.62	23.32	21.39	20.64	21.40	20.30	20.03	18.30
Bantul	17.28	16.97	16.48	15.89	16.33	14.55	14.07	13.43
Gunung Kidul	23.03	22.72	21.70	20.83	21.73	19.34	19.34	17.12
Sleman	10.61	10.44	9.68	9.50	9.46	8.21	8.13	7.65
Yogyakarta	9.62	9.38	8.82	8.67	8.75	7.70	7.64	6.98

Tabel 1.1 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota Yogyakarta 2011-2018

Perhitungan tingkat kemiskinan yang dilakukan BPS tersebut didasarkan pada penduduk yang memiliki nilai rata-rata penghasilan dibawah Garis Kemiskinan. Beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Arius Jonaidi (2019)

yaitu; pendidikan yang rendah, malas dalam bekerja, keterbatasan dalam sumber alam, lapangan kerja, modal usaha dan bahkan beban keluarga, dalam beberapa faktor penyebab kemiskinan inilah yang menyebabkan kenaikan kemiskinan di Indonesia. Namun walaupun begitu Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur, hal tersebut menjadikan sektor ketenagakerjaan tertinggi di Indonesia adalah dalam sektor pertanian.

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Februari 2017 sekitar 39,68 juta jiwa atau 31,89 % penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Meningkatnya jumlah ketenagakerjaan dalam sektor pertanian di Indonesia, menyebabkan besarnya juga tuntutan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan Ekonomi merupakan program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara penuh dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS Yogyakarta tahun 2018, sektor ketenagakerjaan dalam bidang pertanian yang berada di Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 2,28% dan sektor pertanian merupakan sektor ketenagakerjaan yang mengalami penurunan paling besar dibanding sektor lainnya. Menurut Amirul dan Lutfi (2016:4) Sektor pertanian di Kabupaten Gunung Kidul merupakan sektor yang paling dominan apabila dibandingkan dengan sektor yang lainnya dengan nilai rata-rata sebesar 36,49 %. Kecamatan Spatosari dan Panggang merupakan dua kecamatan dengan presentase tertinggi dalam sektor pertanian,

dengan sektor pertanian yang melebihi setengah dari perekonomian di wilayah tersebut.

Menurut Novianti (2019), Indikator yang digunakan dalam mengukur pengangguran sesuai dengan konsep International Labour Organization (ILO) di Indonesia adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada setiap tahunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami penurunan, namun tingkat pengangguran laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran perempuan. Hal ini terlihat dengan adanya peluang usaha perempuan dalam akses pasar tenaga kerja lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan memiliki peranan penting dalam rumah tangga yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak perempuan dalam melakukan pekerjaan di luar rumah. Namun dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih, menjadikan seorang perempuan dapat aktif dalam lingkup usaha di luar pekerjaan rumah. Salah satunya dapat mengikuti program yang didukung pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi para petani terutama dari kalangan perempuan. Adapun program yang diadakan oleh pemerintah yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT). Program ini bertujuan dalam meningkatkan ruang gerak perempuan dalam meningkatkan perekonomian dengan produktivitas yang akan digerakkan oleh para Kelompok Wanita Tani.

Salah satu cara yang akan dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu pemberdayaan masyarakat secara penuh, yang dilakukan dengan cara pemanfaatan dana zakat secara produktif ditinjau dari potensi dana zakat dan infak yang tergolong

besar di Indonesia. Lembaga amil zakat tergolong mempunyai potensi yang bermanfaat sebagai sektor pengumpul dana zakat, infak, maupun sodaqoh yang mempunyai potensi sebagai pengelola dana dalam pelaksanaan zakat produktif guna pengembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Hal ini telah dilakukan penelitian sebelumnya dalam jurnal yang berjudul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*” yang diteliti oleh Mila Sartika (2008) yang mendapatkan hasil serupa dengan penelitian yang akan diajukan yaitu terkait dengan pemberdayaan ekonomi dengan memproduktifkan masyarakat ditempat yang telah ditentukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika dilakukan di Solo dan merupakan program dari LAZ Yayasan Solo dan yang membedakan hanyalah instansi yang melakukan program ini yaitu Dompot Dhuafa Yogyakarta dan bertempat di Dusun Jeruk Legi Gunung Kidul. Begitupun dengan skripsi yang telah disusun oleh Muji Santoso (2014) yang berjudul “*Analisis Penyaluran Dana ZIS Pada Program Pemberdayaan Ekonomi*” telah membahas tentang pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan melalui program Institut Mentas Unggul dan perubahan kesejahteraan bagi para mustahiq dan meningkatnya perekonomian para pelaksana di daerah setempat. Program ini memberdayakan penyaluran dari pengumpulan dana zakat produktif dalam program Institut Mentas Unggul yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muji Santoso (2014) terdapat kesamaan dalam hal pengentasan kemiskinan pada daerah tertentu, namun terdapat perbedaan dalam segi

program yang dilakukan Dompot Dhuafa Yogyakarta yaitu program pertanian yang mempunyai fokus dalam hal “Budidaya dan Home Industri Aloe vera”.

Penelitian ini memiliki fokus dalam program ekonomi pada sektor pertanian yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai salah satu lembaga amil zakat yang berupaya dalam pengentasan kemiskinan melalui program *Budidaya dan Home Industri Aloe vera*. Hal ini dilakukan dengan adanya pemberdayaan masyarakat terutama oleh Kelompok Wanita Tani *Mount Vera Agrotech* yang berbasis pada zakat produktif. Keunikan dari program *Budidaya dan Home Industri Aloe vera* Dompot Dhuafa Yogyakarta adalah pembudidayaan aloe vera pada salah satu pekarangan non produktif yang terus berkembang hingga tahun 2018. Budidaya ini berkembang dengan adanya tenaga kerja yang terdiri dari 100 tenaga kerja perempuan, serta 25 tenaga kerja inti yang turut serta dalam pembudidayaan dan home industri berupa makanan dan minuman dengan komposisi aloe vera sebagai bahan dasarnya. Hal ini dapat mewujudkan program pemerintah dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya wanita serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pada daerah tersebut. Selain adanya pengembangan *Pembudidayaan dan Home Industri Aloe vera*, Dusun Jeruk Legi, Katongan, Nglipar, Gunung Kidul, Yogyakarta juga dijadikan sebagai Desa Wisata Edukasi Aloe vera. Program ini menjadikan kehidupan petani menjadi lebih baik dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai terwujudnya program pemerintah dalam pengembangan program Kelompok Wanita Tani dengan tujuan mengurangi tingkat ancaman ketahanan pangan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana penjelasan dalam latar belakang yang ada, maka hal yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pemberdayaan ekonomi melalui *budidaya aloevera* berbasis zakat produktif di Gunung Kidul?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi melalui *budidaya aloevera* pada Dompot Dhuafa Yogyakarta?
3. Bagaimanakah dampak dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap para KWT Mount Vera Agrotech?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah tertera maka tujuan dari peneliti terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mendeskripsikan pola pemberdayaan masyarakat melalui *budidaya aloevera* berbasis zakat produktif di Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui *budidaya aloevera* dalam program Dompot Dhuafa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui dampak dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap para KWT Mount Vera Agrotech

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat pada beberapa bidang yaitu:

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bacaan dan referensi bagi para akademisi dibidang ekonomi maupun muamalah Islami terkhusus pada Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian terkait program pemberdayaan ekonomi melalui budidaya aloevera berbasis zakat produktif yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta ini bermanfaat bagi peneliti itu sendiri yang berguna untuk menambah ilmu maupun pengalaman secara umum dan dapat mengkaji secara lebih dalam ilmu zakat, pemberdayaan ekonomi dengan basis zakat produktif, dan pendalaman ilmu secara intelektualitas ini dapat memperluas sarana dakwah untuk mengajak *amar ma'ruf nahi munkar* kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Begitupun penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi acuan bagi para peneliti dalam penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Dompot Dhuafa Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana informasi, masukan ataupun saran bagi Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam melakukan

kebijakan dalam program-program terkait pemberdayaan zakat produktif agar lebih optimal dan maksimal dikedepannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian terkait program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif ini dilakukan dengan harapan mampu mewujudkan pemberdayaan zakat produktif yang lebih baik, menambah wawasan masyarakat terkait zakat produktif dan menjadi sarana informasi masyarakat dalam melaksanakan setiap program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif terkhusus dalam sector pertanian dan terwujudnya pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang memudahkan masyarakat dalam bekerja secara produktif tanpa adanya kekhawatiran terkait dana pelaksanaan program.